

RINGKASAN

Kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas, yang merupakan ruas jalan strategis menjadi salah satu permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya aduan mengenai kawasan tersebut. Meskipun PKL berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran, keberadaan PKL di ruang publik tanpa memiliki Surat Penempatan Pedagang (PKL) juga menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, permasalahan fungsi ruang publik, dan berimbas pada ketidakteraturan tata ruang publik. Hal tersebut bertentangan dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan teknik *purposive sampling* untuk informan kunci seperti Kepala Bidang Pasar Dinperindag, Satpol PP, Dinhub, Ketua Paguyuban, PKL, serta menggunakan teknik *accidental sampling* untuk masyarakat pengunjung Jalan Bung Karno. Fokus dalam penelitian ini yaitu analisis implementasi kebijakan menggunakan model Grindle (1980), yang membedakan isi kebijakan dan konteks implementasi dengan pendekatan partisipatif untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi interaktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui model interaktif Miles et al. (2014).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat keselarasan kepentingan pemerintah dengan pedagang, namun aspek manfaat pemberdayaan yang belum dirasakan oleh PKL, perbedaan tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan yang masih *top-down*, tumpang tindih kewenangan pelaksana, serta keterbatasan sumber daya. Konteks implementasi mencakup dinamika kekuasaan kompleks, karakteristik institusi yang lemah dalam koordinasi dan penegakan aturan, serta tingkat kepatuhan rendah akibat tidak ada sanksi konsisten dan legitimasi formal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Jalan Bung Karno belum efektif akibat ketidakselarasan antara isi kebijakan yang normatif dengan konteks implementasi di lapangan, sehingga tujuan kebijakan dalam menciptakan kota tertib dan memberdayakan PKL belum tercapai secara optimal. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat dan memperluas model Grindle dalam konteks administrasi publik di negara berkembang, memberikan kontribusi pada pemahaman kausalitas kepatuhan dalam implementasi kebijakan, serta memperkaya literatur *governance* dan koordinasi antar-instansi. Secara praktis, pemerintah daerah perlu mendorong terbitnya SK Bupati khusus Jalan Bung Karno, merumuskan program pemberdayaan PKL yang konkret, membangun sistem manajemen PKL terintegrasi, dan melaksanakan pelimpahan kewenangan penerbitan SPP kepada Camat; Satpol PP perlu menyusun SOP penegakan aturan yang seragam dan transparan; paguyuban perlu memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah yang bertanggung jawab; serta pedagang perlu mengurus SPP secara proaktif dan berpartisipasi aktif dalam forum sosialisasi kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima

SUMMARY

The complexity of issues surrounding street vendors (PKL) along Bung Karno Road in Banyumas Regency, a strategic thoroughfare, has become a significant public concern, evidenced by numerous complaints about the area. Although street vendors contribute to reducing unemployment rates, their presence in public spaces without a Vendor Placement Permit also causes problems such as traffic congestion, disruption of public space functions, and irregularities in public spatial planning. This situation contradicts Regional Regulation No. 4 of 2011 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Banyumas Regency.

This study employs a descriptive qualitative method, involving purposive sampling for key informants such as the Head of the Market Division at the Department of Industry and Trade, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Department of Transportation, and the Chairperson of the Vendor Association, as well as accidental sampling for visitors to Bung Karno Road. The focus of this research is the analysis of policy implementation using Grindle's (1980) model, which distinguishes between policy content and implementation context, with a participatory approach to identify obstacles and interactive solutions. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and documentation, analyzed through Miles et al.'s (2014) interactive model.

The findings reveal that while normative alignment exists between government and vendor interests, the empowerment dimension of the policy has yet to be realized by street vendors. Additional impediments include divergent levels of desired change, a top-down decision-making structure, overlapping implementing authority, and resource constraints. The implementation context is further characterized by complex power dynamics, weak institutional coordination and enforcement, and low levels of regulatory compliance attributable to the absence of consistent sanctions and formal legal standing. The study concludes that the implementation of Perda No. 4 of 2011 along Jalan Bung Karno remains ineffective, as the normative policy content is poorly aligned with implementation realities on the ground, resulting in the policy's core objectives, establishing an orderly urban environment and empowering street vendors remaining unachieved. Theoretically, this study reinforces and extends Grindle's implementation model in the context of public administration in developing countries, contributes to the understanding of compliance causality in policy implementation theory, and enriches the governance literature on inter-agency coordination. Practically, the local government should facilitate the issuance of a Bupati Decree specifically governing Jalan Bung Karno, formulate concrete PKL empowerment programs, develop an integrated vendor management system, and formally delegate SPP issuance authority to the Sub-district Head; Satpol PP should establish uniform and transparent enforcement standard operating procedures; vendor associations should strengthen their role as accountable government partners; and vendors themselves should proactively pursue SPP registration and actively engage in policy socialization forums.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Street Vendors